

**AKAD JUAL BELI *DROPSHIP* (PENERAPAN FATWA DSN
MUI No. 110 TAHUN 2017) TERHADAP PUTRA BATIK
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

MUKHAMMAD NUR AZIZA
1502036152

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Mukhammad Nur Aziza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara :

Nama : Mukhammad Nur Aziza
NIM : 1502036152
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Akad Jual Beli *Dropship* (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan"

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 23 Maret 2020
Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP.19690507 199603 1 005

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mukhammad Nur Aziza
NIM : 1502036152
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : **Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

9 April 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Semarang, 9 April 2020

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002

Penguji Utama I

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001



**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Mukhammad NurAziza**

NIM 1502036152

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Akad Jual Beli *Dropship* (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 terhadap Putra Batik Pekalongan).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. Mahsun, M. Ag.
Anggota/Penguji3	: M. Shoim, M.H.
Anggota/Penguji4	: Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,65 (tiga koma enam puluh lima) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”. (QS. Al-Nisa: 29).¹

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”(HR. Ibn Majah).²

¹ Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

² Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al Misriyah, t.th), h.10, Hadis ke 2269.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ibunda dan Ayah Tercinta

Teruntuk yang tercinta kedua orang tua yang selalu memberi semangat dalam setiap untaian do'a nya. Khususnya Ibunda, surga pertama yang kutuju dalam puncak cita-citaku. Ayahanda, yang memberikan bimbingan dalam setiap langkahku. Keluarga besar yang memberikan banyak motivasi dan dukungan,

Terima Kasih Ibu... Terima Kasih Ayah...

My Brother's dan Sister

Untuk kakak dan adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua...

My sweet Heart "Fanny Nur Anggraini"

Sebagai tanda cinta kasihku, Mas Izza persembahkan karya kecil ini buatmu,

Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Terima kasih

"ay"

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 23 Maret 2020

Deklarator

Mukhammad Nur Aziza
NIM. 1502036152

ABSTRAK

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih, sehingga segala sesuatu menjadi lebih mudah, bahkan dalam melakukan akad jual beli, seperti halnya pada Putra Batik Pekalongan yaitu model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN- MUI/IX/2017 terhadap akad jual beli menjelaskan bahwa penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku. *Dropshipping* merupakan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun. Penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada pemasok, pemasok akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktek jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan? Dan bagaimanakah akad jual beli *dropship* (penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) terhadap Putra Batik Pekalongan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Putra Batik Pekalongan, selain itu juga menggunakan data sekunder yang berupa kajian pustaka, berupa buku-buku dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli secara online pada Putra Batik Pekalongan merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*, *supplier* akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Transaksi *dropshipping* ini dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa pilihan akad yakni dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Ba'i as-salam* dan *wakalah*. Secara hukum Islam, Putra Batik Pekalongan telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual Putra Batik Pekalongan tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *dropshipping*, Putra Batik Pekalongan, dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I

	Dammah	Ditulis	U
--	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW., yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih, sehingga segala sesuatu menjadi lebih mudah, bahkan dalam melakukan akad jual beli, seperti halnya pada Putra Batik Pekalongan yaitu model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN- MUI/IX/2017 terhadap akad jual beli menjelaskan bahwa penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku. *Dropshipping* merupakan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun. Penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada pemasok, pemasok akan mengirim produk kepada pelanggan langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

Bapak H. Tolkah, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, nasihat serta bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Kedua, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I. H. Tolkah. MA., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., selaku wakil Dekan III. Supangat M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ketiga, seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu juga pengetahuan, dan segenap staff karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Keempat, Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, AH, Gus Khotibul Umam, beserta keluarga ndalem PP. Madrosatul Qur'an al-Aziziyah Beringin Ngaliyan Semarang, yang telah banyak mengajarku belajar Al-Qur'an..

Akhirnya, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, tak lupa kata maaf yang begitu dalam penulis haturkan apabila selama proses penulisan skripsi ini telah banyak merepotkan dan terdapat kesalahan dari penulis kepada seluruh pihak. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Maret 2020
Penulis

MUKHAMMAD NUR AZIZA
1502036152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TEORI JUAL BELI, *KHIYĀR*, DAN FATWA

A. Konsep Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Syarat Sah Jual Beli	20
4. Rukun Jual Beli	21
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	22
6. Jual Beli yang Dilarang	23
7. Hikmah Jual Beli	26
B. Teori <i>Khiyār</i>	27
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	28
3. Tujuan	31

4. Hukum <i>Khiyār</i> (Hak Pilih) dalam Jual Beli	32
5. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	34
6. Berakhir dan Hilangnya Hak <i>Khiyār</i>	41
C. Fatwa	42
1. Pengertian Fatwa	42
2. Dasar Hukum Fatwa	43
3. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	44

BAB III DESKRIPSI *DROPSHIPPING* DAN GAMBARAN UMUM PUTRA BATIK PEKALONGAN

A. Deskripsi Tentang Sistem <i>Dropship</i>	50
1. Sekilas Tentang <i>Dropshipping</i>	50
2. Skema <i>Dropshipping</i>	52
3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online dengan Sistem <i>Dropshipping</i>	55
4. <i>Dropshipping</i> dalam Jual Beli Online	57
B. Putra Batik Pekalongan	59
1. Profil Putra Batik Pekalongan	59
2. <i>Dropshipping</i> di Toko Online Putra Batik Pekalongan	63
3. Tatacara Pelaksanaan Jual Beli Secara Online di Putra Batik Pekalongan	65
4. Keuntungan yang diambil pemilik Toko Online Putra Batik Pekalongan	66
5. Aspek pengetahuan konsumen mengenai sistem <i>dropshipping</i>	67
6. Kekurangan menjalankan bisnis online dengan sistem <i>dropship</i>	67
7. Faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui internet	68

BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI No. 110 TAHUN 2017 TERHADAP AKAD JUAL BELI *DROPSHIP* PADA PUTRA BATIK PEKALONGAN

A. Analisis Praktek Jual Beli <i>Dropship</i> di Putra Batik Pekalongan	70
B. Analisis Akad Jual Beli <i>Dropship</i> (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan	72

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	86
---------------------	----

B. Saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha, dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba,”

Untuk saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada.

Online shop merupakan salah satu kegiatan jual beli. Pembayaran dilakukan dengan sistem yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. *Online shop* adalah salah satu fasilitas yang disajikan internet yang memberikan berbagai kemudahan. Kemudahan yang diberikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, tanpa harus bertatap muka, pelanggan bisa membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat *Online shop* semakin diminati.

Dalam semua proses bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses *ijab qābul*, ada materai, ada perjanjian, dan lain-lain. Dalam dunia *online*, harmonisasi antara aspek norma, nilai, dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.³

Dalam melakukan bisnis setidaknya tidak akan melakukan paling tidak dua hal, yaitu: pertama, diskriminasi diantara penjual, pembeli, dan tidak

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 224.

mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek mal bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa-apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat, dan mudah. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti halnya sistem jual beli *dropship*. Jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.

Transaksi jual beli *dropship* adalah setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Selanjutnya barang yang dipakai akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli. Namun nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *dropshipper*. Jadi, intinya ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen.⁴ Bila

⁴ [www. BursaMuslim.com](http://www.BursaMuslim.com) diakses tanggal 17 November 2019.

dilihat adanya tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, maka transaksi ini hampir sama dengan *Samsārah*.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak membutuhkan modal, waktu, dan tenaga yang besar, serta tidak membutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Sistem jual beli ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.⁵ Jadi, kalau barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijualbelikan.

Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam Islam, yaitu:

1. Barang yang dijual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang dijual harus *māl mutaqaawwim*. *Māl mutaqaawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyār*.
3. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 72.

mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang diperjualbelikan bukan milik *dropshipper* atau tidak dibawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya,⁶ sedangkan dalam *dropship* barangnya tidak diketahui secara nyata, hanya dapat dilihat melalui internet.

Adapun ketentuan para '*aqid* yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional NO.110/DSN-MUI/IX/2017 adalah⁷

1. Penjualan (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun kewenangan yang berifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Melihat keterangan dari penjelasan berdasarkan fatwa DSN MUI di ataspenulis ingin menganalisis secara lebih mendasar perihal kesesuaian antara skema transaksi *dropship* dengan fatwa DSN MUI tentang akad jual beli karena dua skema transaksi ini memiliki keterkaitan. Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul "**Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan?
2. Bagaimanakah akad jual beli *dropship* (penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) terhadap Putra Batik Pekalongan?

⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Edisi Terjemah, (Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 30.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di lihat permasalahan yang di paparkan diatas tujuan penelitian ini di maksudkan:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan
- b. Untuk mengetahui akad jual beli *dropship* (penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) terhadap Putra Batik Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum masyarakat pada khususnya.
 - 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Untuk Memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana (S1) bagi penulis.
 - 2) Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita

dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi karya Nurul Nasihah dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*E-Commerce*) (Studi Komparatif Empat Mahzab)”. Hasil penelitian ini membahas tentang jual beli online melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli online tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat paramadzhah. Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada sistemnya, penulis tidak hanya menjabarkan tentang apa itu jual beli online, namun lebih menjurus kepada sebuah sistem jual beli online dengan metode *dropship* yang sesuai dengan Fatwa MUI.⁸

Kedua, skripsi karya Putra Kalbuadi dengan judul “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti sistem *Dropshipping* dalam jual beli online (forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *Dropshipping* serta tinjauan fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli online tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi hal yang instant. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya. Dengan bermodalkan koneksi internet, memesan barang, melakukan pembayaran hingga barang yang dipesan sampai didepan rumah dapat dilakukan dengan mudah. Disini penulis menekankan bagaimana sistem *Dropshipping* ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis online tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem *Dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad

⁸ Nurul Nasihah “Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*E-Commerce*) (Studi Komparatif Empat Mahzab)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, tidak dipublikasikan.

salam maupun akad *wakalah*. Sistem *Dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.⁹

Ketiga, skripsi karya Desi Fatmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship* Online (Studi Kasus Ariana Shop)”. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik *dropship* online di Ariana Shop ini, penjual/*dropshipper* tidak memiliki atau menyediakan barang yang akan dijual, ia hanya bermodalkan foto yang diposting di toko onlinenya. Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di Ariana Shop ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah hasil kerja sama antara penjual/*dropshipper* dengan *supplier* selaku pemilik barang asli. Dan untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini merupakan akad *salam* dan itu diperbolehkan.¹⁰

Keempat, skripsi karya Yuni Mardiyana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online* (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”. *Dropshipping by reseller* merupakan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun, dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada pemasok, pemasok akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi *Dropshipping by reseller* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad *Ba'i as-salam* dan *wakalah*. Toko Online Ramadhani Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem *Dropshipping by reseller* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.¹¹

⁹ Putra Kalbuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, tidak dipublikasikan.

¹⁰ Desi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)”, *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017, tidak dipublikasikan.

¹¹ Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”, *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, tidak dipublikasikan.

Kelima, jurnal karya Ika Yunia Fauzia dengan judul “Akad *Wakalah* Dan *Samsārah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online” Jurnal ini membahas bagaimana cara melakukan jual beli sistem *dropship* dengan akad *wakalah* atau dengan akad *samsarah*. Perbedaan mendasar dengan jurnal yang penulis kaji adalah bagaimana jual beli sistem *dropship* ini dengan menggunakan akad yang telah ada, namun bagaimana kesesuaian jual beli tersebut dengan Fatwa MUI yang ada saat ini.¹²

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹³ Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Pendekatan

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁵ Hal ini disebabkan karena hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi

¹² Ika Yunia Fauzia, “Akad *Wakalah* Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Studi Keislaman*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Indonesia, Vol. 9, No. 2 Maret 2015.

¹³ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2

¹⁴ Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 56.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), h. 3.

pula lembaga-lembaga dengan mempunyai proses-proses yang mewujudkan berlakunya tujuan yang sama yaitu tercukupinya suatu kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari suatu fenomena yang didalamnya terdapat suatu pola sesuai dengan konteks pembahasannya. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegend*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicand*) menjadi sangat relevan bagi penelitian hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penafsiran (*hermeneutik*) yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas serta penafsiran antisipasi dalam menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁷ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹

3. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 33-34.

¹⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 13.

pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²¹

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.²² Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik akad jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.²⁵ Data sekunder bisa diperoleh dari beberapa sumber berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum Islam, jurnal-jurnal, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik akad jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan dalam Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. 12, h. 107.

²¹ *Ibid.*, h. 120.

²² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 44.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, h. 225.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi*, h. 136.

²⁵ *Ibid.*, h. 136.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁶

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

²⁶Zainuddin, *Metode*, h. 13.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁸

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi pemilik Putra Batik Pekalongan dan pembeli atau *reseller* pada Putra Batik Pekalongan, serta *supplier* yang berperan pada proses *dropshipping* tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.²⁹ Terkait dengan penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto, seperti audio dari wawancara, foto wawancara, foto barang penjualan dan semua yang terkait dengan *dropship* di Putra Batik Pekalongan.

c. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 162.

²⁸ *Ibid.*, h. 163.

²⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi*, h. 47.

dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktik akad jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan dalam Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli, mulai dari pemesanan oleh pembeli, kemudian pemesanan oleh Putra Batik Pekalongan, prosedur pembayaran sampai dengan prosedur pengiriman.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.³¹ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.

Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian.
- b. Penyajian Data (*display data*), berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian

³⁰ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012), h. 37-40.

³¹ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), h. 80.

kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; kerangka teori tentang jual beli dalam fiqh dan Fatwa DSN No. 110 tahun 2017, *khiyar* dalam jual beli, dan membahas teori *electronic commerce* (*e-commerce*).

Bab Ketiga; terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang gambaran umum sistem *Dropshipping*; dan sub bab *kedua*, berisi gambaran umum Putra Batik Pekalongan dan sistem *dropship* di Putra Batik Pekalongan.

Bab keempat: terdiri dari dua sub bab, bab *pertama* berisi tentang jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan; dan sub bab kedua berisi tentang analisis Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 terhadap akad jual beli *dropship* pada Putra Batik Pekalongan.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Terakhir berupa Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TEORI JUAL BELI, *KHIYĀR*, DAN FATWA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Ba'i (البيع): kontrak jual beli, merupakan penjualan barang atau properti tertentu dengan izin bebas dari pihak untuk harga yang telah ditentukan. Kontrak ini melibatkan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qābul*).³² *Ba'i* dapat juga diartikan pelaksanaan akad untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla. Atau *ijab* dan *qābul* atas dua jenis harta yang tidak berarti menderma atau tukar menukar harta bukan atas jalan *tabarru'*.³³

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'* “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah” (Yusuf: 20), “Dan sesungguhnya, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir” (al-Baqarah: 102). Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'iun* dan *bayyi'un* dan *syaarin*.³⁴ Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al Ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian

³² Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 21.

³³ Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 34.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-Ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-Ba'i*) yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-Ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁵ Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syari'ah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.³⁶ Jadi jual beli merupakan suatu kegiatan bermuamalah yang saling tukar menukar antara barang dengan barang, atau barang dengan harta lain yang disepakati antara kedua belah pihak dan saling rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.³⁷

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Larangan jual beli yang mengandung riba.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

³⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.101.

³⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).³⁸

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya atau mengenai waktu untuk jual beli kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.³⁹

Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”. (QS. Al-Nisa: 29).⁴⁰

Maksud dari ayat diatas adalah Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti, yang

³⁸ Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

³⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42.

⁴⁰ Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras babi dan yang lainnya. Jika yang diakadkan adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya sebab pengecualian pada ayat diatas terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.⁴¹

2) Takaran dalam Hukum Islam

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli harus menegakkan keadilan dan kejujuran. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al- Isra': 35).⁴²

Maksud dari ayat diatas yaitu penyempurnaan takaran dan timbangan dinyatakan lebih baik akibatnya. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka mengantarkannya kepada kecurangan. Bila itu terjadi maka rasa aman tidak akan tercipta, dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.⁴³

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazar dan Hakim:

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 27.

⁴² Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84.

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلٌ لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

“Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa’ah ibn Rafi’ ibn Khadij dari kakeknya, Rafi ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seseorang: apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”. (HR. Ahmad).⁴⁴

Maksud dari hadis diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalannya. Oleh karena itu, jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴⁵

2) Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”(HR. Ibn Majah).⁴⁶

Maksud dari hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela diantara kedua belah pihak. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang harus dilakukan karena menjaga hak orang. Seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.⁴⁷

⁴⁴ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 37, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Awqaf al Misriyah, t.th), h. 217, hadis ke- 17728.

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Awqaf al Misriyah, t.th), h.10, Hadis ke 2269.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih ...*,h. 67.

c. Dasar dalam Ijma'

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama' dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Pasal 56-115.⁴⁸ Jadi dalam Islam melakukan jual beli diperbolehkan. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisaa' (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*" (HR. Ibnu Majah).
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali atas seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan dalam Agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khimar.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih ...*, h. 23-25.

- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, membeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. “Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.⁴⁹

4. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu akad. Jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi rukunnya. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum diktakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.⁵⁰

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selma satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli

⁴⁹Madani, *Fiqh ...*, h.104-105.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵¹

Jadi jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu akad jual beli.

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, bukan tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa kembali oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.⁵²

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, h. 71-73.

⁵² Mardani, *Hukum ...*, h 171.

orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekali pun perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang diudara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khimar dan darah.
- 5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.⁵³

6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli sah dan jual beli fasid. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkas sebagai berikut:⁵⁴

a. Terlarang sebab *ahlih* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber tasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

⁵³*Ibid.*, h 172.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

- 1) Jual beli orang gila, adapun ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. begitu pula jenisnya.

- 2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyis* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

- 3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (ket erangan sifat- sufat nya). Adapun ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

- 4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*).⁵⁵

b. Terlarang sebab sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan atas keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan antara lain:

- 1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah stunya.

- 2) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

⁵⁵*Ibid.*, h. 93-95.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

3) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁵⁶

c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan. dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:⁵⁷

1) Jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli gharar, yaitu jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.

⁵⁶*Ibid.*, h.95-97.

⁵⁷*Ibid.*, h.97.

- c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
 - e) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 4) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendtangkkan pertentangan diantara manusia.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

- 1) Jual beli riba, yaitu riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- 2) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- 3) Jual beli waktu azan jumat, yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat.
- 4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain yaitu seorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁸

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madarat.⁵⁹ Sedangkan menurut Sayyid Sabil hikmah jual beli ialah: Sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 97-101.

⁵⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, h. 798.

sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁶⁰

B. Teori *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyār* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”⁶¹

Menurut buku karangan Sudarsono, ia mengutip kata-kata dari Moh. Anwar bahwa, *khiyār* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).⁶² *Khiyār* dalam makna lain yaitu pemilihan dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.

Sedangkan *khiyār* menurut Abdulrahman al-Jaziri, dalam soal jual beli dan lainnya adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Yang dimaksud dua hal di atas adalah mengurungkan jual beli dan

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, h. 121.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 99.

⁶² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h. 407.

melangsungkannya. Jadi orang yang melakukan akad (jual beli) boleh memilih antara dua hal tersebut.⁶³

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual, serta unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat islam memberikan hak *khiyār*, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa, *khiyār* itu adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan tersebut. Syariat Islam juga menciptakan hak *khiyār* ini dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan jual beli. Jadi, di sini pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli ada hak *khiyār* bagi keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁶⁴

Para Ulama fikih mendefinisikan *khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:⁶⁵

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ.

“*Khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)”.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperoleh *khiyār* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.⁶⁶

⁶³ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 349.

⁶⁴ *Ibid*, h. 350-351.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Cet. 4, h. 164.

⁶⁶ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh*, h. 350-351.

Adapun landasan *khiyār* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa’: 29).⁶⁷

b. Hadits Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه المسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyār*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyār*nya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyār* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Muslim)⁶⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ. — رواه أبو داود

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 65.

⁶⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25.

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyār* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyār*.” (HR. Al-Muslim dan imam ahli hadis lainnya).⁶⁹

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ — رواه مسلم

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyār*.” (HR. Muslim).⁷⁰

Berdasarkan penjelasan hadis. diatas dapat dikatakan bahwa Allah SWT membolehkan *khiyār* dalam masalah jual beli. Sebab, dalam jual beli kadang- kadang orang membeli suatu barang atau menjualnya karena bungkusnya yang khusus saja dan kalau sekiranya bungkus itu sudah lepas maka hanya penyesalan atas penjualan atau pembelian yang terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, percecokan, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama. Jadi, *khiyār* ini digunakan untuk suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing- masing pihak yang melakukan transaksi.

c. *Ijma’* Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* (Syarah Shahih Muslim), Jilid VII, Terj. Darwis, L.C, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 556.

⁷⁰ Imam An-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Terj. Thariq Abdul Azizi Tamimi, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013), Cet. 2, h. 719.

yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷¹

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyār*, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. *Khiyār* menurut ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *'aib*, atau *ru'yah*, atau memilih diantara dua barang jika *khiyār ta'yin*.⁷²

3. Tujuan

Tujuan diadakan *Khiyār* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli atau melakukan transaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. *Khiyār* bertujuan untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan. Status *khiyār* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷³

Dalam buku karangan Sudarsono, menurut syariat Islam, *khiyār* juga bertujuan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif transaksi tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *khiyār* itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu si pembeli maupun si penjual. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak penjual dan pembeli memikirkan dampak positif dan

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), h. 131.

⁷² Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), h. 250.

⁷³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107.

⁷⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, h. 407.

negatifnya, hal ini dilakukan agar dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu yaitu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syarat jual beli seperti di atas dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sempurna.

4. Hukum *Khiyār* (Hak Pilih) dalam Jual Beli

Khiyār (hak pilih) dalam jual beli itu disyaratkan dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

“Penjual dan pembeli memiliki khiyār selama keduanya belum berpisah kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang khiyār hingga setelah berpisah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.”⁷⁵

- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyār* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyār* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda: *“orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.”*(Diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim. Hadist ini *Ṣahīḥ*).
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual beli.

⁷⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 312.

- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تُصَرُّوا إِلَّا بِلِّ وَالْعَنَمِ فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

“Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia mempunyai khiyār (hak pilih) diantara dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha’ kurma.” (Muttafaq Alaih).⁷⁶

- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

“Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda : “Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya.” (HR Ibnu Majah).⁷⁷

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai

⁷⁶ Shahiiah al-Jaami’ as- Shaghiir (no. 7347), Shahiiah al-Bukhari (IV/361, no. 2148), Sunan Abi Dawud (IX/310, no. 3426)

⁷⁷ Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin YAzid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Daru ihyail kutub al-arabiyaah-Faisal Isa al-halabi, Vol II, h 755.

khiyār (hak pilih) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.⁷⁸

Pembatalan dan meneruskan akad dalam hal ini dapat terjadi pada masa *khiyār* dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat pembatalan akad, penjual dan pembeli menggunakan kalimat “aku membatalkan jual beli”, “Aku telah mencabut kesepakatan jual beli”, “Aku ambil kembali barang”, “Aku kembalikan uang pembelian”. Pada saat melanjutkan akad seseorang dapat berkata, “Aku teruskan jual beli”, “Aku teruskan transaksi”, atau “Aku tetapkan jual beli” dan ungkapan sejenis lainnya.⁷⁹

Menurut pendapat imam Syafi’i, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan melanjutkan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang berada ditangannya. Adapun penawaran jual beli dan mewakili transaksi pada masa *khiyār* bukan merupakan pembatalan dari pihak penjual, bukan pula kesepakatan meneruskan akad dari pihak pembeli. Sebab, kedua hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa pihak penjual tidak mempertahankan barang dan pihak pembeli mempertahankannya. Terkadang hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan barang yang diserahkan, untuk mengetahui apakah ia mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.⁸⁰

5. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari syara’, seperti *khiyār majlis*, ‘aib, dan *ru’yah*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār syarat* dan *khiyār ta’yin*.⁸¹

a. *Khiyār Majlis*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad

⁷⁸*Ibid.*, h. 494-495.

⁷⁹ Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 681.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130.

dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu *majlis*, sekalipun sudah terjadi *ijab* kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ijab* kabul, menurut mereka *ijab* kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.⁸²

Mahzab Syafi'i berpendapat adanya *khiyār majlis*. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan *ijab* kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan.⁸³

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain.⁸⁴ Pada prinsipnya *khiyār majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad;
- 2) Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.⁸⁵

Khiyār majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁸⁶

Khiyār majlis dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 139.

⁸³ Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 43-45.

⁸⁴ Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Adzkar Al-Majmu*, Juz 9, (Mesir: Muniriyah, tt), h. 192.

⁸⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, h. 410.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh*, h. 99.

berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyār majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyār majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.

Pandangan Para Ulama tentang *khiyār majlis*:

1) Ulama Hanafiah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya *ijab* dan *qābul*, serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji, sebagaimana firman-Nya: kamu semua harus menepati janji, sedangkan *khiyār* menghilangkan keharusan tersebut.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sebagaimana firman-Nya: “*kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.*” (QS. An-Nisa’: 29)

Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan *ijab* dan *qābul*. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyār majlis* golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan keberadaan *khiyār majlis* sebab mereka tidak mengakui adanya *khiyār majlis*.

2) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyār majlis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ijab* dan *qābul*, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga, dan lain-lain.⁸⁷

Hak *khiyār majlis* ini tidak berlaku lagi (gugur/hilang) dengan sebab-sebab berikut:

⁸⁷ Rachmat Syafi’i, *Fiqh*, h. 113-115.

- a) Jika penjual dan pembeli setuju memilih untuk meneruskan akad jual beli tersebut.
- b) Jika penjual memilih meneruskan akad itu, maka hak *khiyār*nya gugur, tetapi hak *khiyār* pembeli masih berlaku.
- c) Jika pembeli jadi meneruskan akad itu, maka hak *khiyār*nya telah gugur, tetapi hak *khiyār* penjual masih berlaku.
- d) Gugur hak *khiyār* penjual dan pembeli jika keduanya atau salah seorang dari keduanya telah berpisah dari *majlis* pada akad jual beli itu.

b. *Khiyār ‘Aib*

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. ‘*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.⁸⁸ Para ulama memprioritaskan *khiyār ‘aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).⁸⁹

Khiyār ‘aib artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimannya.

Khiyār ‘Aib mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

⁸⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, h. 98.

⁸⁹ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Terj. Moch. Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 1, h. 800.

- 2) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- 3) Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 4) Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 5) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual.
- 6) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁹⁰

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada halangan, yang dimaksud dengan “segara” disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau sipenjual tidak ada (sedang berpergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak meminta ganti rugipun hilang pula.⁹¹

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Mereka mengecualikan dengan pembatasan yang terakhir momotong jari yang lebih, atau bagian kecil dari paha atau betis yang tidak mewariskan keburukan dan tidak menghilangkan tujuan.⁹²

Khiyār 'aib (cacat) ini kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual-belikan dan dapat diwarisi oleh waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya

⁹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 408.

⁹¹ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 628-684.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 210-211.

menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁹³

Menurut pakar fiqh syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama;
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa barang itu ada cacat ketika akad itu berlangsung;
- 3) Ketika akad itu berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan;
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁹⁴

c. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁹⁵ Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. *Khiyārru'yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.⁹⁶ Sedangkan, Mahzab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang *ghaib* tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

d. *Khiyār Syarat*

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.⁹⁷

Khiyār syarat yaitu (hak pilih) yang dijadikan oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi

⁹³ Nasrun Haroen, *Fiqh*, h. 130.

⁹⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum*, h. 82.

⁹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh*, h. 137.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h. 101.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Jilid III, Cet. 4, h. 132.

akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu. *Khiyār syarat* boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu sampai batas waktu tiga hari. Bila *khiyār syarat* melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal. *Khiyār* ini boleh kurang dari tiga hari, sesuai dengan hadis: *Hadis Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seseorang bercerita kepada Nabi SAW ia selalu tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika kamu membeli sesuatu maka katakan kepada penjualannya, “Tidak boleh ada penipuan sama sekali.”* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari).⁹⁸

Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, “*khiyār syarat* adalah hak yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal.”⁹⁹

e. *Khiyār Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyār ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.¹⁰⁰

Hak pilih (*khiyār*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- d. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.

⁹⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011), h. 414.

⁹⁹ Abdurrazak As-Sanhuri, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, Terj. Samsul Anwar, (Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005), h 317.

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h. 103.

- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.¹⁰¹

6. Berakhir dan Hilangnya Hak *Khiyār*

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyār*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyār* ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu *khiyār* ialah sesuai dengan kebutuhan.¹⁰²

Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- b. Menggugurkan *khiyār*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti “aku telah menggugurkan *khiyār*”, dan ucapan yang serupa.
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.¹⁰³

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya *khiyār* ialah sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyār majlis*.
- b. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan jika dengan *khiyār ru'yah*.
- c. Dengan berakhirnya jangka waktu *khiyār*. Selama tiga hari jika menggunakan *khiyār syarat* atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.

¹⁰¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. 1, h. 86.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Jilid III, Cet. 4, h. 102.

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, Juz IV, h. 567-569.

¹⁰⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 275.

- d. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik *khiyār*.
- e. Masa waktu *khiyār* telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik *khiyār*, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
- f. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak *khiyār*. Jika *khiyār* dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika *khiyār* milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
- g. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual dan lainnya dalam *khiyār 'aib*, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.¹⁰⁵
- h. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, gila, dan sebagainya.¹⁰⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyār* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan).¹⁰⁷

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.¹⁰⁸ Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Para Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār*, apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁰⁹

C. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

¹⁰⁵ Musthafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mahzhab Imam Syafi'i*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 21.

¹⁰⁶ Al-Kamal Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz V, (Beirut: Dar al-Taqwa, tt), h. 121.

¹⁰⁷ Imam Al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i*, Juz V, (Beirut: Dar Fikr.), h. 174.

¹⁰⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), h. 165.

¹⁰⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, tt), h. 3.

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan bentuk jamak *fatawa* yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion.

Pada ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹¹⁰

2. Dasar Hukum Fatwa

Pada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminologi ‘Fatwa’ terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ

يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".” (Q.S Yusuf : 43).¹¹¹

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَى النِّسَاءِ

الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الْوُلَدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا

لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

¹¹⁰ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 64.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 240

*“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (Q.S An-Nisa: 127).*¹¹²

3. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli menimbang:

- a. Bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktekkan akad jual beli.
- b. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa sebagai induk
- c. Bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan pedoman.¹¹³

Mengingat:

- a. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29).*¹¹⁴

- b. Hadits Nabi SAW:

Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُرَيْمِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَمَّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan

¹¹² Ibid., h. 98.

¹¹³ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 1.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, h. 83.

Reasulullah Saw. berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Majah).¹¹⁵

c. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹⁶

Memperhatikan:

- a. Surat dari PermataBank syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/ VVI/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- b. Pendapat dan saran Working group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
- c. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017.

Memutuskan : Menetapkan Fatwa Tentang Akad Jual Beli

Pertama: ketentuan utama:

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*).
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak jual, *mutzman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.

¹¹⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.th), h. 10, Hadis ke 2269.

¹¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 9 dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 2.

7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas mutsman yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-Musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-Musawamah* sering disebut jual beli biasa.
9. *Bai' al-Amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-Muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' Munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-Mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-Taqsith* adalah jual beli yang pembyarannya secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-Asalam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-Istishna'* adalah jaul beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harga berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.
17. *Bai' al-urabah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.¹¹⁷

Kedua: ketentuan berkaitan *Shigat al-Aqd*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.¹¹⁸

Ketiga : ketentuan terkait para pihak

1. Penjualan (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan yang

¹¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 3-4

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 4.

bersifat ashiyyah maupun kewenangan yang berifat niyabiyyah, seperti wakil.¹¹⁹

Keempat: Ketentuan Terkait Mutsman (*Mabi'*)

1. *Mutsman/Mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-*).
2. *Mutsman/Mabi'* harus berupa barang dan/atau berbentuk hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. *Mutsman/Mabi'* harus wajib, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan terkait Tsaman

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-Musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-m'ajjal*), dan angsuran/ bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/ bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).¹²⁰

Keenam: ketentuan kegiatan dan produksi

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istishna', maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli.

Ketujuh: ketentuan penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka perjanjian batal.

¹¹⁹*Ibid.*,

¹²⁰*Ibid.*, h 5.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹²¹

¹²¹*Ibid.*, h. 6.

BAB III

DESKRIPSI *DROPSHIPPING* DAN GAMBARAN UMUM PUTRA BATIK PEKALONGAN

A. Deskripsi Tentang Sistem *Dropship*

1. Sekilas Tentang *Dropshipping*

Dropshipper adalah pemilik produk, dalam hal ini produsen atau grosir yang menyediakan layanan penjualan sistem *dropshipping*. Sementara *dropship* adalah orang yang membantu menjualkan produk-produk yang dimiliki oleh *dropshipper* tanpa membeli produknya terlebih dahulu untuk stok.

Sistem *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang memungkinkan *dropship* untuk menjual berbagai macam produk langsung dari produsen atau grosir (*dropshipper*) kepada konsumen, tanpa menyimpan stok serta melakukan pengemasan (*packing*) dan pengiriman barang kepada konsumen. sistem ini cocok bagi orang yang ingin berjualan tetapi tidak mempunyai produk sendiri dan tidak ingin direpotkan dengan urusan pengemasan dan pengiriman barang karena semuanya dilakukan oleh pihak produsen atau grosir yang bertindak sebagai *dropshipper*.

Sistem jual beli *dropshipping* ada dua, yaitu:

- a. *Dropshipping* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari *dropshipper* atau *supplier*.

Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan, penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan namun barangnya masih berada ditangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan dengan pedagang pertama. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik *dropship* tersebut dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi ia sudah menawarkan barang.

- b. *Dropshipping* dengan barang yang mendapat izin dari *dropshipper* atau *supplier*.

Untuk sistem kedua ini, biasanya dilakukan dengan jalan pihak *dropship* meminta izin kepada *dropshipper* atau *supplier* untuk ikut menjualkan barangnya. Dengan demikian pedagang berperan selaku orang yang diizinkan mendapatkan kuasa menjualkan. Selaku orang yang mendapatkan hak kuasa, maka kedudukannya hampir sama dengan *reseller*. Hanya saja, kondisi barang yang dijual belum ada ditangan pedagang.¹²²

Secara umum model kerjasama antara *reseller dropship* dengan *supplier* atau *dropshipper* ada dua macam, yaitu:

- a. *Supplier* memberikan harga ke *reseller dropship*, kemudian *reseller dropship* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukan keuntungan *reseller dropship*. *Supplier* memberikan kebebasan kepada *reseller dropship* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *reseller dropship*. Biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*.
- b. Harga sudah ditetapkan sejak awal oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *reseller dropship* bagi setiap barang yang terjual. Jenis kedua ini umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan ada batas minimal penjualan.¹²³

Berbisnis online memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan. Pembeli tidak butuh informasi mengenai siapa penjual dan dari mana produk yang dipesannya berasal.

¹²²<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diambil pada tanggal 11 Maret 2020.

¹²³ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, November 2016.

Fenomena keanoniman penjual online ini kemudian berkembang menjadi sebuah tren bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran. Unikny, si pengecer tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi online dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.

Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesaler/supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok produk sama sekali.

Menjadi seorang *dropshipper* bukan berarti kita bisa langsung membayangkan keuntungan yang berlimpah di depan mata kita, karena menjadi seorang *dropshipper* tidak semudah seperti yang dibayangkan atau diceritakan. Kita tidak akan tahu jika kita tidak memulainya sendiri.¹²⁴

Menjalani bisnis itu yang terpenting adalah ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan itu didapat setelah kerja keras. Alhamdulillah dari usaha *dropshipping* ini saya sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan juga sudah mampu untuk membeli motor, handphone, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya.¹²⁵

2. Skema *Dropshipping*

¹²⁴<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diambil pada tanggal 11 Maret 2020.

¹²⁵*Ibid.*

Selaku *dropship*, hanya bertugas mencari pembeli dengan cara menawarkan atau mempromosikan produk dari produsen atau grosir kepada konsumen dengan menggunakan katalog atau foto-foto produk yang telah disediakan. Setelah ada pemesan atau pembeli yang membayar, *reseller dropship* hanya menghubungi pihak produsen atau grosir untuk dikirimkan produk sendiri. Sehingga *reseller dropship* tidak perlu melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada konsumen, karena semuanya sudah dikerjakan oleh penyedia *dropshipping*.¹²⁶

Dalam sistem ini, *dropship* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropship* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerjasama antara dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.¹²⁷

Dalam Forum Putra Batik Pekalongan terdapat banyak *supplier* yang menyediakan sistem *dropshipping*, diantara banyaknya *supplier* tersebut maka harus diteliti dan dicermati *supplier* manakah yang dapat dijadikan sebagai objek untuk memulai bisnis *dropshipping* ini.

¹²⁶ Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2.

¹²⁷ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 2.



Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diambil pada tanggal 11 Maret 2020.

Keterangan:

- Sebagai seorang *dropshipper* maka wajib bagi kita untuk meminta izin kepada *supplier* untuk mengcopy gambar produk yang ingin kita jual di website mereka.
- Sebagai seorang *dropshipper* maka disarankan untuk memasarkan barang dagangan secara online melalui Instagram, Whatsapp, Line, Facebook, dan Marketplace seperti Jakmall, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain.
- Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan memesan barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah kita tetapkan sebagai *dropshipper*/yang telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*.
- Kemudian anda sebagai *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *buyer*/pembeli tersebut.
- Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama anda sebagai *dropshipper*.

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping*

Saat ini berbisnis ada saja jalan dan caranya. Khusus bagi mereka yang memiliki modal kecil atau waktu yang terbatas biasanya lebih cocok menjalankan bisnis bersifat *dropship*, sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online dimana si penjual tidak harus memiliki modal besar atau produk sendiri. Sistem *dropship/dropshipping* berbeda dengan sistem *Reseller* yang mengharuskan penjual untuk membeli produk kepada si *supplier*/pemilik barang untuk stok, lalu kemudian dijual ke konsumen dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan bisnis dengan sistem *dropship*:

- a. Tanpa modal besar, ini sangat cocok buat anda yang tidak memiliki modal besar. Cukup bermodal media sosial dan pulsa, tentunya untuk mempromosikan dan menjalin komunikasi dengan calon *buyer*.
- b. Praktis, kita benar-benar *free*, karena hanya mempromosikan, lalu ketika ada pembeli kita tinggal menghubungi *supplier*, lalu ia akan mengirimkan produk tersebut ke alamat si pembeli. Menariknya, data pengirim adalah nama kita. Semua proses adalah tanggung jawab *supplier*.
- c. Dapat dikerjakan di mana saja, cukup bermodal pulsa baik untuk telepon, sms, maupun berlangganan internet, kita bisa mengerjakannya di mana saja.
- d. Tidak ada biaya operasional, tidak seperti bisnis biasa yang butuh biaya operasional, bisnis dengan sistem *dropship* tidak memerlukan biaya operasional yang besar.¹²⁸

Dengan segala kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sistem *dropshipping* ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Bagi *dropshipper*, dalam sistem *dropshipping* ini harus benar-benar mencari *supplier* yang bagus. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah

¹²⁸<https://komunitas.Putra Batik Pekalongan.com/news/6955-gs7ctb>, diakses pada 11 Maret 2020.

seperti, *supplier* tidak mengirimkan barang pesanan dari si *dropshipper*, yang akhirnya nama baik *dropshipper* yang menjadi taruhan dan juga dapat menjadi kerugian finansial bagi si *dropshipper* itu sendiri.

- b. Dalam sistem ini pembeli tidak dapat melakukan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayarannya, yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, karena penjual tidak memegang barang dagangannya yang memang barang tersebut ada di pihak *supplier*.
- c. Layaknya jual beli online, dalam sistem ini rentan terhadap tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembelinya, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh *dropshipper* tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diterima oleh *customer*. Hal ini memang murni kesalahan dari *supplier*, namun secara tidak langsung *dropshipper* yang akan dicari oleh *customernya* untuk penggantian barang yang tidak sesuai tersebut.

Jual beli online tentu tidak terlepas dari aksi penipuan, tidak bertemunya penjual dengan pembeli secara langsung menimbulkan celah bagi tindak penipuan ataupun wanprestasi untuk dapat terjadi pada setiap transaksinya. Dalam Forum Putra Batik Pekalongan, untuk menghindari tindak penipuan tersebut, marketplace tersebut sudah otomatis menjadi jasa pihak ketiga dalam setiap transaksi yang terjadi setiap harinya. Pihak ketiga ini merupakan perantara antara penjual dan pembeli dimana dana dari pembeli akan masuk ke dalam rekening Putra Batik Pekalongan terlebih dahulu, tidak langsung masuk ke dalam rekening si penjual. Kemudian pihak Putra Batik Pekalongan akan memberitahu pihak penjual bahwa dana dari pihak pembeli sudah masuk ke dalam rekening Putra Batik Pekalongan, kemudian pihak Putra Batik Pekalongan akan mengkonfirmasi kepada pihak penjual untuk segera mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli dengan menggunakan jasa ekspedisi yang telah tersedia di sana. Lalu, ketika barang sampai menurut jasa ekspedisi yang telah digunakan, maka Putra Batik Pekalongan akan memberitahu kepada pihak pembeli bahwa barang yang telah dipesan sudah diterima di alamat yang telah pembeli

infokan sebelumnya. Menariknya setelah barang pesanan telah dinyatakan sampai oleh Putra Batik Pekalongan, pembeli dapat mengecek keadaan barang yang telah dipesan tersebut selama 1-3 hari. Dalam waktu tersebut pihak pembeli dapat melakukan komplain kepada Putra Batik Pekalongan bilamana barang yang sampai tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Kemudian pihak Putra Batik Pekalongan akan membuat *room* diskusi kemudian mengundang akun pihak pembeli dan akun pihak penjual untuk melakukan komplain disana. Setelah diskusi dinyatakan selesai dan pihak pembeli menyatakan telah menerima barang yang sesuai untuk selanjutnya, maka pihak Putra Batik Pekalongan akan melakukan transfer dana kepada pihak penjual. Akan tetapi, apabila dalam waktu tersebut tidak ada komplain dari pihak pembeli maka secara otomatis pihak Putra Batik Pekalongan akan menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dengan pihak pembeli dengan baik, lalu mencairkan dana yang telah ditransfer oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Dengan menggunakan sistem ini maka transaksi bisa dipastikan aman sehingga tidak terjadi kerugian pada pihak manapun.

Dengan memahami beberapa kelemahan dari sistem *dropshipping* maka sebelum memulai bisnis online dengan sistem *dropshipping* ini, tentu para pelaku bisnis akan dapat mencari solusi-solusi dari kelemahan tersebut sehingga bisa mengurangi nilai kelemahan dari sistem ini. Ditambah dengan memperhatikan dan menanamkan prinsip syariah di dalamnya sudah tentu hal ini akan membuat para pelaku bisnis online yang beragama Islam menjadi tidak meragukan lagi hukum halal dan haramnya, sehingga dimasa mendatang dengan sistem ini akan dapat menggalakkan para wirausahawan muda untuk dapat menjalankan usahanya tanpa harus terbentur modal berupa uang.

4. *Dropshipping* dalam Jual Beli Online

Bisnis online merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu bisnis dan online. Kata bisnis sendiri bisa diartikan sebagai istilah untuk suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.

Secara historis, kata bisnis berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu *bussiness* yang memiliki kata dasar *busy* yang berarti sibuk. Disini tentu saja bisnis merupakan kesibukan mengerjakan aktivitas dan pekerja yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan semua kegiatan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi yang menjalankannya.

Adapun kata online dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang terhubung dalam jaringan atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai darinh. Dalam istilah lain online dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana sekelompok orang terhubung ke dalam sebuah jaringan internet.¹²⁹

Maraknya bisnis online diikuti dengan maraknya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang sangat familiar dengan para pedagang kecil, pedagang dadakan dan seseorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. *Dropship* merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual. Ilustrasinya adalah seperti ini: “Ulil merupakan pengusaha garmen yang menjual busana batik, kemudian Ulil memproduksi dan memfoto beberapa batik tersebut dan memasarkannya dengan cara bisnis online. Kemudian ada beberapa *reseller dropship* Ulil (penjual yang ingin bergabung memasarkan produk yang dibuat oleh Ulil) mengambil foto-foto yang dipasarkan oleh Ulil dan *reseller* tersebut memasarkan kepada konsumen (hanya dengan bantuan foto). Ketika konsumen membeli produk tersebut dari *reseller* Ulil (*dropshipper*), maka *reseller dropship* tersebut memerintahkan kepada konsumen untuk membayar dengan cara transfer, *reseller dropship* itu pun membeli dari Ulil dan Ulil langsung mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen *reseller dropship* tersebut. Dengan cara mencantumkan bahwa nama pengirim adalah nama *reseller* atau *dropshipper* Ulil”.

¹²⁹ Catur Hadi Purnomo, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 1.

Penjualan dalam bisnis online kerap terjadi dengan modus penipuan, dikarenakan kualitas yang tidak sesuai dengan gambar kemudian lambat laun berkurang dengan sendirinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdal Islam S. Imheed Moohmed, Nurdiana Binti Azizan, Mohd Zalisham Jali (2013), kepercayaan (*trust*) dan *pastexperience* dalam pembelian online merupakan motivasi utama bagi konsumen untuk melakukan pembelian secara online. Jadi, penggerak bagi niat pembelian para konsumen di dalam bisnis ini adalah sesuatu yang *untouchable*, yaitu kredibilitas para penjualnya yang bisa dibuktikan dengan produk dan layanan yang dibeli oleh konsumen karena konsumen akan melakukan pembelian berulang ketika mereka puas dan begitu juga perlakuan sebaliknya ketika mereka tidak puas. Jadi, pelaku bisnis online yang bertahan di papan atas adalah mereka yang memiliki integritas yang tinggi karena bisnis ini lebih didominasi oleh aspek kepercayaan satu sama lainnya.¹³⁰

B. Putra Batik Pekalongan

1. Profil Putra Batik Pekalongan

Munculnya situs-situs jual beli online atau biasa disebut *e-commerce* makin memudahkan aktivitas jual beli. Kompas online menyebutkan bahwa dari data lembaga riset Internasional Data Corporation (IDC), nilai perdagangan lewat unternet di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun. Master Card Worldwide menambahkan hasil surveinya, pada Febuari 2012 di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan belanja online sebesar 15%.¹³¹

a. Sejarah

Mulai Januari 2015 bisnis online ini berubah nama yang bermula belum tau dinamakan apa dan di tahun 2018 menjadi Putra Batik

¹³⁰ Ika Yunia Fauziyah, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online", *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*, Vol. 9 No.2, 2 Maret 2015.

¹³¹ Tim BPKN, "Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia" dikutip dari www.bpkn.go.id diakses pada 11 Maret 2020, h. 1.

Pekalongan. Awal berdirinya bisnis ini mulai tahun 2015 dan belum dinamakan Putra Batik Pekalongan, yang telah dibangun oleh Ulil Albab, dan di tahun 2018 baru dinamakan Putra Batik Pekalongan karena Ulil berasal dari kota batik, yaitu kota Pekalongan, sehingga akhirnya bisnis busana batik ini dinamakan Putra Batik Pekalongan yang merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang produksi fashion batik.¹³²

Putra Batik Pekalongan berdiri pada tahun 2015 dan berkembang pada tahun 2018. Karena pada tahun 2018 perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Media sosial membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah salah satu manfaat dari keberadaan media sosial adalah sebagai media promosi suatu produk.

Putra Batik Pekalongan adalah sebuah toko online yang dibuat oleh Ulil melalui jejaring sosial yaitu instagram, tepatnya dapat di akses pada alamat instagram Putra Batik Pekalongan, beliau adalah sarjana ekonomi yang baru lulus di tahun 2019, yang beralamat Jl. H. Abdullah RT 06 RW 02 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Bermula ketertarikannya dengan *fashion* dan pemahaman tentang perkembangan *fashion* Putra Batik Pekalongan semakin berkembang hingga saat ini. Mulai dari pakaian anak-anak, remaja hingga dewasa bisa didapatkan melalui Putra Batik Pekalongan.¹³³

Putra Batik Pekalongan menggunakan model penjualan *dropshipping*. Ulil memilih berbisnis online dengan sistem *dropship* karena ia tidak perlu mengeluarkan modal untuk stok barang dagangan. Jadi Ulil mencari *supplier* yang mau menerimanya sebagai *reseller* dan

¹³² Wawancara dengan Ulil Albab, Pemilik Toko Online Putra_Batik_Pekalongan, 8 Maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

¹³³ *Ibid.*

menyanggupi untuk mengirim kepada konsumen dengan sistem *dropshipping* kepada para pembeli.¹³⁴

Putra Batik Pekalongan memposisikan dirinya sebagai penjual asli, sehingga tidak semua konsumen mengetahui bahwa Putra Batik Pekalongan adalah *dropshipper*. Putra Batik Pekalongan mencari *customer* yang mau membeli barangnya dengan harga relatif sama dengan penjual aslinya sehingga ia tidak kesulitan untuk menjual barang tersebut.

Ulil melakukan order sebagai pembeli biasa, dan produk tersebut dikirim ke alamat pembeli (*customer* Putra Batik Pekalongan) dengan label Putra Batik Pekalongan. Ulil memutuskan untuk berjualan secara online karena selain mengisi waktu luang juga termotivasi oleh teman-teman yang kebetulan banyak teman-temannya yang di luar kota atau daerah lain yang mengetahui bahwa dia memiliki usaha toko fashion online. Penjual tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membuat toko dan menyetok barang karena toko online tidak memerlukan tempat untuk menjualnya. Disini Ulil menggunakan sebuah akun instagram dan whatsapp untuk mempromosikan barang yang ia jual.¹³⁵

Adapun alasan Ulil membuka bisnis online, yaitu:

- 1) Tidak memerlukan banyak modal untuk membuka lapak toko online atau situs jual beli. Untuk membuat sebuah toko online membutuhkan modal relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko offline, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Bandingkan dengan toko online, modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko online hanyalah membuat sebuah jejaring sosial seperti instagram, BBM, facebook dan penjual tinggal *upload* barang yang akan dijualnya.¹³⁶

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

- 2) Tidak perlu tempat atau ruangan untuk menyimpan barang yang akan dijual. Karena penjual hanya memajang katalog dalam jejaring sosial yang dibuatnya.¹³⁷
- 3) Sarana promosi yang mudah dan murah. Hanya perlu mengambil gambar yang telah disediakan, kemudian diupload ke alamat instagram atau media sosial lainnya dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk melihatnya. Dari beberapa sarana tersebut bisa diperoleh dan di manfaatkan dengan biaya yang murah bahkan ada yang gratis.¹³⁸
- 4) Resiko yang ditanggung relatif kecil, bahkan tidak ada resiko yang diambil oleh penjual karena penjual hanya bermodalkan promosi saja. Jika ada pembeli, maka penjual melakukan konfirmasi ke toko *Supplier* untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesannya. Sebelum dikirim pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang sudah dipesan dan penjual tidak perlu menyetok.¹³⁹
- 5) Tidak perlu repot harus melakukan pemaketan, lalu mengirimkan barang ke pembeli. Penjual tidak perlu mengirimkan barang yang dijual karena barang tersebut dikirim oleh *Supplier*.¹⁴⁰

b. Lokasi Usaha

Usaha ini, terletak di Jl. H. Abdullah RT 06 RW 02 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

c. Visi dan Misi

Visi adalah menyediakan barang-barang untuk *costumer* lebih memajukan kualitas barang online, dan menunjukkan ke *costumer* barang online juga memiliki mutu kualitas bagus dan real.

Misi adalah menghasilkan dan menjual produk tekstil dengan kualitas terbaik dan inovatif, dengan melibatkan umat sebanyak-banyaknya yang didukung dengan sistem manajemen terpadu.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

2. *Dropshipping* di Toko Online Putra Batik Pekalongan

Dalam berbisnis online terdapat transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa produk atau barang pesannya sesuai permintaan.¹⁴¹

Fenomena bisnis online ini kemudian berkembang menjadi sebuah trend bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran yang dilakukan oleh pengecer yang berstatus sebagai *reseller* di sebuah Toko. Namun pada hal ini pengecer tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorang atau perusahaan grosir (*supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Pihak *supplier* inilah yang akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.¹⁴²

Hal menarik dari trend *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi online dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada orang lain. *Dropshipper* disini hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok produk sama sekali.¹⁴³

Menjadi seorang *dropshipper* bukan berarti bisa langsung membayangkan keuntungan yang berlimpah, karena menjadi seorang *dropshipper* tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kita tidak akan tahu jika tidak memulainya sendiri. Menjalani bisnis itu yang terpenting adalah tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan itu didapat setelah kerja keras.¹⁴⁴

¹⁴¹ A. Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW dan Khadijah ra*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 148.

¹⁴² Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Mengislamkan Marketing Masyarakat dan Memasyarakatkan Marketing Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 484-485.

¹⁴³ Mauren Anindya, “Pahami Untung Rugi Menjalankan Bisnis *Dropship*”, artikel dikutip dari <http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4> diakses pada 11 Maret 2020.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ulil Albab, Pemilik Toko Online Putra_Batik_Pekalongan, 8 Maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

Gambar Skema *Dropshipping*



Sumber https://komunitas.Putra_Batik_Pekalongan.com/news/6955-gs7ctb, diakses pada 11 Maret 2020.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

- Supplier*, yaitu adalah pihak pemilik barang, baik toko maupun agen barang.
- Reseller*, yaitu penjual online yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.
- Buyer*, yaitu pembeli barang dari *reseller*.

Keterangan gambar:

- Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko online sendiri.
- Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan mengorder barang tersebut, kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual yang telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*).

- c. Kemudian *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut
- d. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.

Toko Online Putra_Batik_Pekalongan mempunyai segmentasi pasar untuk usia remaja hingga dewasa, sehingga sebagian besar berkisar usia 17 sampai dengan 35 tahun. Dalam hal ini Ulil hanya bermodalkan promosi ke orang lain, dan ia tidak perlu memikirkan masalah penyetokkan barang dan pengemasan (*packing*). Pembeli pada toko ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia, karena seluruh Toko online dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, dan juga didukung dengan jasa pengiriman yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.¹⁴⁵

3. Tatacara Pelaksanaan Jual Beli Secara Online di Putra Batik Pekalongan

a. Prosedur pemesanan oleh Pembeli

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di katalog online pada akun instagram Putra Batik Pekalongan atau Whatsapp. Setelah itu pembeli berkomentar atau pesan lewat media chat Whatsapp. Setelah itu, Ulil menanyakan ketersediaan produk yang dimaksud kepada *supplier*. Apabila barang yang dimaksud ada, maka segera Ulil menyatakan *booked/keep* kepada *supplier*-nya dan menginstruksikan kepada pembeli untuk segera melakukan pembayaran.

b. Prosedur pemesanan oleh Putra_Batik_Pekalongan

Prosedur pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada Putra Batik Pekalongan sama dengan prosedur pemesanan yang dilakukan oleh Putra Batik Pekalongan kepada *suppliernya*, karena dalam proses ini, Putra Batik Pekalongan berperan sebagai pembeli. Hanya saja, perbedaan terletak pada mekanisme pengiriman. Karena telah terjadi kesepakatan antara Putra Batik Pekalongan dan *supplier*, maka Putra Batik Pekalongan meminta kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya atas

¹⁴⁵*Ibid.*

nama Putra Batik Pekalongan menuju ke alamat *customer* Putra Batik Pekalongan.

c. Prosedur pembayaran

Prosedur pembayaran pada Putra Batik Pekalongan adalah melalui transfer ke rekening milik Ulil. Putra Batik Pekalongan tidak menerima pembayaran secara langsung (*face to face*), karena transaksi dilakukan via online. Nominal uang yang ditransfer adalah harga yang diperoleh Putra Batik Pekalongan dari *supplier* beserta biaya packing, keuntungan yang diambil oleh Putra Batik Pekalongan beserta ongkos kirim barang yang dibeli dari alamat *supplier* menuju ke alamat pembeli. Apabila pembeli telah mentransfer sejumlah yang disepakati, maka Putra Batik Pekalongan segera membeli barang yang ia jual dan melakukan pembayaran kepada *supplier* beserta ongkos kirim yang telah ia bebaskan kepada pembeli.

d. Prosedur Pengiriman

Setelah melakukan pembayaran kepada *supplier*, Ulil memberikan alamat *customernya* kepada *supplier* untuk mengirimkan barang tersebut atas nama Putra Batik Pekalongan. Sampai disini, pekerjaan Ulil selesai, ia hanya menunggu *supplier* mengirimkan nomor resi pengiriman sebagai bukti bahwa barang yang dimaksud telah dikirim. Nomor resi tersebut ia kirimkan ke pembeli. Namun berbeda halnya dengan *supplier* yang tidak bekerjasama dengan Putra Batik Pekalongan. *Supplier* yang tidak bekerjasama dengan Putra Batik Pekalongan mengirimkan produk yang ia jual tidak dengan menggunakan identitas Putra Batik Pekalongan, melainkan menggunakan identitasnya sendiri kepada alamat yang diberikan oleh Putra Batik Pekalongan.

4. Keuntungan yang diambil pemilik Toko Online Putra Batik Pekalongan

Dalam menjalankan bisnisnya, Ulil yang tidak melakukan *mark up* yang terlalu tinggi, keuntungan yang ia ambil pada setiap item barang tidak melebihi Rp. 50.000,- tergantung barang yang dijual. Untuk baju atau aksesoris yang harganya kurang dari Rp. 100.000,- Ulil hanya

mengambil untung Rp. 10.000,-. Untuk item barang dengan harga dari *supplier* Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- Ulil mengambil keuntungan sebesar Rp. 25.000,-. Namun keuntungan yang diambil Ulil tidak paten dengan hitungan seperti ini.

5. Aspek pengetahuan konsumen mengenai sistem *dropshipping*

Kepada para konsumen, Ulil mengaku sebanyak 80% dari *customernya* tidak mengetahui bahwa Ulil adalah seorang *reseller*. Namun. Banyak juga teman atau kerabat yang tinggal dalam satu kota dengan Ulil menanyakan alamat Putra_Batik_Pekalongan dan meminta untuk melakukan pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD), namun Ulil tidak menyanggupinya karena barang yang ia jual tidak *ready* (tidak ada pada tangan Ulil), maka hal inilah yang menyebabkan beberapa orang mengetahui bahwa Ulil adalah seorang *reseller*.

6. Kekurangan menjalankan bisnis online dengan sistem *dropship*¹⁴⁶

Kehadiran sistem *dropshipping* dalam dunia jual beli online memang membawa peluang bagi para pebisnis online yang menekuni dunia ini namun tanpa memiliki modal yang cukup. Dengan segala kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sistem *dropshipping* ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya:

- a. Bagi *dropshipper*, dalam sistem *dropshipping* ini harus benar-benar mencari *supplier* yang bagus dan terpercaya. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah seperti *supplier* tidak mengirimkan barang pesanan dari *dropshipper*, yang akhirnya nama baik *dropshipper* yang menjadi taruhan dan juga dapat menjadi kerugian finansial bagi si *dropshipper* itu sendiri.
- b. Dalam sistem ini pembeli tidak dapat melakukan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayarannya, yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan membayar saat bertemu.
- c. Dalam sistem ini rentan adanya tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat barang langsung siapa penjual atau pembelinya, dan

¹⁴⁶*Ibid.*

terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang *dropshipper* tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh *customer*.

7. Faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui internet¹⁴⁷

Adapun faktor yang mempengaruhi jual, melalui internet yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor pendukung jual beli melalui internet, yaitu:
 - 1) Dengan pesatnya perkembangan internet, kemudahan dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, mendukung pelaku-pelaku bisnis terutama dalam bidang perdagangan, memasarkan komoditinya (promosi) dan jual beli melalui internet.
 - 2) Barang yang ditawarkan selalu update, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan di data secara langsung dengan computer, antara barang masuk dan barang keluar. Jadi pembeli bisa langsung mengetahui stok barang tersebut masih atau telah habis.
 - 3) Penggunaan internet di dunia dan khususnya di Indonesia yang semakin meningkat. Semakin berkurangnya ruang gerak pelanggan atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, disebabkan oleh kesibukan atau rutinitas ataupun hal yang lainnya.
- b. Faktor-faktor penghambat jual beli melalui internet adalah sebagai berikut:
 - 1) Tidak meratanya pengguna atau pemakai internet. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan data-data sebagai berikut:
 - a) Pemakai internet sebagian besar ialah orang berpendidikan, jarang pemakai internet oleh orang yang tidak berpendidikan. Terutama jika ingin mengakses website berbahasa asing tentunya pemakai harus mengerti bahasa tersebut.
 - b) Umumnya para pengguna internet mengakses internet dari tempat kerja, sekolah, kampus, dan hanya sekitar 30% yang

¹⁴⁷ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 33.

mengakses secara pribadi dari rumah. Namun hal ini berbeda di Indonesia karena kemungkinan besar sekitar 75% atau lebih pengguna internet mengakses internet dari rumah karena sudah banyak kantor-kantor atau sekolah yang sudah terkoneksi dengan internet.

- c) Adanya keraguan atau ketakutan oleh para pengunjung internet untuk bertransaksi secara online. Masalah ini adalah hambatan terbesar dalam jual beli melalui internet, karena banyaknya *cybercrime* (kriminalitas di internet), khususnya *cybercrime* dalam *e-commerce*. Segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan oranglain dalam perdagangan melalui internet, seperti kartu kredit, nomor rekening atau data penting lainnya yang disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI No. 110 TAHUN 2017 TERHADAP AKAD JUAL BELI *DROPSHIP* PADA PUTRA BATIK PEKALONGAN

A. Analisis Praktek Jual Beli *Dropship* di Putra Batik Pekalongan

Pada dasarnya akad pada Putra Batik Pekalongan memiliki karakter seperti akad jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media yang digunakannya. Dengan berkembangnya teknologi menghadirkan metode untuk menjual produk secara Online melalui fasilitas internet yang efektif dan efisien. Akad pada Putra Batik Pekalongan adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli Putra Batik Pekalongan dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.

Penawaran yang dilakukan oleh Putra Batik Pekalongan, yaitu dengan menampilkan katalog barang-barang yang dijual dengan gambar sedetail mungkin dari arah depan dan samping yang disediakan dalam situs Putra Batik Pekalongan untuk para pelanggan sehingga para pembeli bisa melihat barang dengan jelas. Kemudian dalam setiap katalog diberi penjelasan juga secara detail mengenai harga yang jelas. Hal ini memenuhi rukun objek jual beli dan hak pilih bagi salah satu pihak untuk meneruskan akad atau yang sering disebut *khiyār*. Pada akad jual beli Putra Batik Pekalongan hak *khiyār* yang digunakan adalah *Khiyār syarat* yaitu hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-*fasakh*-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan jangka waktu yang digunakan oleh Putra Batik Pekalongan selambat-lambatnya adalah 15 hari.

Terjadinya kesepakatan atau akad yang merupakan rukun dari jual beli, dalam transaksi Putra Batik Pekalongan antara penjual dan pembeli dinyatakan dengan persetujuan pelanggan untuk memesan suatu barang. Konsumen memesan barang dengan memilih barang yang ada di katalog online pada akun instagram

Putra Batik Pekalongan atau Whatsapp. Setelah itu pembeli berkomentar atau pesan lewat media chat Whatsapp. Setelah itu, *dropshiper* menanyakan ketersediaan produk yang dimaksud kepada *supplier*. Apabila barang yang dimaksud ada, maka segera menyatakan *booked/keep* kepada *supplier*-nya dan menginstruksikan kepada pembeli untuk segera melakukan pembayaran.

Akad yang terdapat pada Putra Batik Pekalongan merupakan akad yang Shahih apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya. Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.¹⁴⁸ Mengapa begitu karena pada Putra Batik Pekalongan sudah memenuhi rukun dan Syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal, *ijab* dan *qabūl* dan merupakan akad yang *nafiz* yaitu (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya Putra Batik Pekalongan merupakan Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Model transaksi pada Putra Batik Pekalongan ini hampir sama dengan *bai' as-salam*. *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian,¹⁴⁹ sedangkan akad jual beli pada Putra Batik Pekalongan dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Putra Batik Pekalongan memberikan waktu 2 hari dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

¹⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 52.

¹⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78.

Dalam sistem *dropshipping* terjadi dua kali akad dalam satu transaksi, akad yang pertama yaitu akad antara pembeli dengan *reseller*, dalam hal ini terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak tepenuhi, yaitu *reseller* menjual barang yang belum menjadi miliknya. Namun, apabila telah terjadi kesepakatan antara *supplier* dan *reseller* dimana *supplier* memberikan izin kepada *reseller* untuk menjualkan produknya, maka hal ini diperbolehkan karena *reseller* dianggap kepanjangan tangan dari *supplier* dan *reseller* mewakili *supplier*. Untuk menjualkan barang miliknya. Mengenai barang yang tidak ada pada *reseller* ketika ia menjual barang tersebut, maka hal ini termasuk dalam kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual beli *salam*.¹⁵⁰

Kemudian, akad yang kedua yaitu antara *reseller* dengan *supplier*. Tidak ada permasalahan dalam akad yang kedua ini, karena *reseller* terlebih dahulu meminta izin kepada *supplier* untuk menjualkan barang miliknya, maka dalam hal ini *reseller* bertindak mewakili *supplier*, dimana terjadi akad *wakalah* dalam proses jual beli ini, dan hukumnya adalah sah. Kedua belah pihak (*supplier* dan *reseller*) mendapatkan keuntungan atas transaksi ini. Jual beli ini disebut *Ba'i al-fuḍuli*.¹⁵¹

B. Analisis Akad Jual Beli *Dropship* (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan

Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Begitupun dengan transaksi jual beli online, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan transaksi jual beli online tersebut menjadi haram hukumnya.

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad jual beli yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis mengacu lebih jauh kepada akad *salam* dan akad *wakalah*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi. Dengan kata lain, *salam* adalah pemesanan barang yang

¹⁵⁰ Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah saw dan Khadijah ra*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 137.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 138.

spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*), sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.¹⁵²

Sedangkan *wakalah*, pada prinsipnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Para pihak yang terkait dalam transaksi

‘*Aqid* adalah pihak-pihak yang bertransaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh ‘*aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah*, *wilayah*, *iradah*. *Ahliyah* bermakna keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Mereka akan memiliki *ahliyah* apabila telah *baligh* dan berakal. *Wilayah* diartikan sebagai hak atau kewenangan, yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹⁵³ Sedangkan *iradah* bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.¹⁵⁴

¹⁵² Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, Cet.1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 56.

¹⁵³ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 32-33.

¹⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 55-56.

a. Penjual

Seorang penjual haruslah memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualkannya. Putra Batik Pekalongan tidak memiliki barang sendiri akan tetapi mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam jual beli model *dropshipping* di Putra Batik Pekalongan disini penjual menggunakan fasilitas jejaring internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui instagram dan whatsapp.

Untuk rukun yang pertama ini dari Putra Batik Pekalongan sudah jelas bahwa penjual tidak memiliki barang yang dijual akan tetapi mempunyai izin untuk menjualnya, hal ini sesuai dengan rukun jual beli, sehingga tidak ada masalah pada barang tersebut. Tetapi barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, karena penjual menjual barang milik orang lain tetapi mendapat izin untuk menjualnya.

Menurut penulis seharusnya penjual Putra Batik Pekalongan menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko. Karena, secara prinsip status Putra Batik Pekalongan adalah wakil bagi pemilik barang. Putra Batik Pekalongan bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik offline atau online.

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad jual beli secara online yang diterapkan di Putra Batik Pekalongan tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pembayaran, dilakukan melalui Bank yang dikirimkan ke rekening Putra Batik Pekalongan.

Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa dan sudah cukup umur, dikarenakan Bank pasti sudah mempunyai prosedur batasan

umur dalam pembuatan rekening di Bank. Analisis penulis dari rukun ini tidak ada permasalahan, dan sudah sesuai dengan rukun akad yang sah.

2. Objek Transaksi

a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan terimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara online di Putra Batik Pekalongan belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual (Putra Batik Pekalongan) walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Putra Batik Pekalongan dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan.

b. Adanya kejelasan

Kejelasan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu jual beli secara online. Kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya lengkap dengan ciri-ciri baju tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak Putra Batik Pekalongan. Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pihak akan terkena akibat hukum. Putra Batik Pekalongan telah mengantisipasi hal ini dengan menggunakan metode pembayaran dimuka secara lunas, beserta ongkos kirim ke alamat pembeli yang harus dibayarkan oleh pembeli.

3. *Ijab Qabūl*

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabūl*) dalam Islam diperbolehkan baik dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan. Dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi saling memahami dan ridho. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam Putra Batik Pekalongan yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka atau secara langsung. Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya, beserta warna, ukuran, harga barang tersebut.

Dalam *ijab qabūl* akad secara online yang diterapkan di Putra Batik Pekalongan sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam *ijab* dan *qabūl* yang diterapkan dengan perkataan melalui sms, telepon, ataupun media sosial lainnya. Pendapat penulis tidak ada masalah, karena sesuai dengan rukun akad. Disini juga telah ada kerelaan dari kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.

Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman. Hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli, namun diserahkan lewat bantuan ekspedisi pengiriman seperti JNE, JNT, POS. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaannya membayar biaya pengirimannya juga. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.¹⁵⁵

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang memfasilitasi Putra Batik Pekalongan dari sebuah jejaring sosial yaitu instagram yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua

¹⁵⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 444.

belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan akad transaksi dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jejaring internet.

Dalam jual beli online penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan didepan majelis akad. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan mentranfer uang ke bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirim barang yang sudah dipesan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.¹⁵⁶

Didalam QS. Al-Baqarah: 185 dijelaskan

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ (١٨٥)

“.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”¹⁵⁷

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia memiliki pola pikir untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli.¹⁵⁸ Dari konsep tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah perekonomian.

Dari sekian analisis yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas akad jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut harus memenuhi 4 hal mengenai syarat barang yang di akadkan, antara lain:¹⁵⁹

¹⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 37.

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Jilid I*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), h. 24.

¹⁵⁸ Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 177.

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 178-180.

1. Mengenai *lawfulness*, yakni barang tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan Allah SWT.
2. Masalah *existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.
3. *Delivery*, yakni harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Penetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Mengenai pentransferan oleh pihak pembeli dan pengiriman barang oleh penjual harus sesuai waktu yang disepakati kedua pihak. Pada pembeli apabila ia telah membayarkan produk yang ia beli, maka ia akan mempunyai bukti berupa struk pengiriman lewat atm atau bank. Sedangkan mengenai pengiriman barang oleh penjual apabila ia telah mengirimkan barang maka ia akan mempunyai bukti pengiriman berupa resi pengiriman yang harus ia kirimkan ke pembeli agar pembeli tersebut bisa mengecek sampai mana barang yang ia beli.
4. *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai dengan barang yang diperjualbelikan.

Dari keempat hal tersebut diatas, berikut analisis penulis terkait kriteria pada Putra Batik Pekalongan, yaitu:

1. Analisis Pemesanan

Pada proses pemesanan, barang yang dibeli oleh *customer* Putra Batik Pekalongan tidak diserahterimakan pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang telah disepakati. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk dalam kategori jual beli *salam*. Dalam proses pemesanan ini, Putra Batik Pekalongan telah memberikan keterangan pada setiap foto yang ada pada albumnya, sehingga pembeli mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini telah memenuhi syarat jual beli *salam*, yaitu jelas jenis, macam, sifat, dan kadarnya.

2. Analisis Pembayaran

Besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada Putra Batik Pekalongan telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual beli *salam*, yaitu harga harus diterima pada saat akad.¹⁶⁰ Putra Batik Pekalongan telah memberikan harga terhadap produk yang ia jual, sekaligus menentukan ongkos kirimnya. Besarnya biaya ongkos kirim sesuai dengan harga yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman barang.

3. Analisis Pengiriman

Dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan, sebenarnya Putra Batik Pekalongan hanya membantu memasarkan produk yang dimiliki yang dijual oleh *supplier*, karena dari berbagai resiko yang mungkin timbul, Putra Batik Pekalongan tidak mau menanggung resiko tersebut, maka dalam hal ini terjadi pemalsuan identitas pengirim, karena Putra Batik Pekalongan mengaku kepada pembeli bahwa ia penjual asli, Putra Batik Pekalongan meminta kepada *supplier* untuk mengirimkan barang atas nama Putra Batik Pekalongan. Maka disini muncul indikasi adanya penipuan (*tadlis*) karena Putra Batik Pekalongan mengaku sebagai penjual asli dan menyamarkan identitas *supplier*. Terlebih, jika terjadi pengaduan dari *customer*, Putra Batik Pekalongan melempar tanggung jawabnya kepada *supplier*. Apabila *supplier* tidak mau bertanggung jawab, maka yang dirugikan adalah konsumen. Seharusnya jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya.¹⁶¹

4. Analisis *mark up* harga

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang membeli suatu barang diperbolehkan menjual kembali dengan harga pokok (harga pembelian), atau boleh juga menjualnya lebih mahal, baik kepada penjualnya sendiri maupun kepada orang lain, baik penjualan itu dilakukan sebelum penyerahan uang

¹⁶⁰ Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), h. 237.

¹⁶¹ Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), h. 495.

maupun sesudahnya.¹⁶² Dengan demikian, maka pengambilan laba diperbolehkan.

Namun karena Putra Batik Pekalongan memposisikan diri sebagai pedagang asli dimata pembelinya, maka seharusnya *mark up* harga yang dilakukan oleh Putra Batik Pekalongan sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai pedagang asli apabila terdapat komplain dari konsumennya, namun yang terjadi demikian, ketika terjadi komplain, Putra Batik Pekalongan bertindak sebagai perantara yang meneruskan komplain tersebut sebagai *supplier*, demikian juga apabila barang sedang dalam masa pengiriman oleh *supplier*, pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.

Sebagai solusi, jual beli model *dropshipping* bisa dimodifikasi, sehingga diperbolehkan secara syariah dengan beberapa cara, yaitu: solusi pertama, harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier* (pemilik barang). *Dropshipper* hanya menjalankan *marketing* dan dia mendapatkan *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. *Dropshipper* menjual jasa pemasaran, dan dia mendapat upah dari jasa pemasarannya.

Solusi kedua, *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* kemudian baru dikirim ke pembeli. Namun dalam transaksi ini ada satu catatan penting, yaitu bahwa pembeli yang sudah membeli barang dari *dropshipper* diberi hak penuh untuk membatalkan atau melanjutkan akad sebelum barang dikirim.

Solusi ketiga, pembeli mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak ia beli, kemudian *dropshipper* mencari barang pesanan pembeli. Lalu *dropshipper* membeli barang dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh *dropshipper*. Dan semua resiko selama pengiriman barang ditanggung oleh *dropshipper*. Intinya disini, *dropshipper* telah membeli barang tersebut dari *supplier*.

¹⁶² Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung, Hasyimi, 2004), h. 239.

Solusi keempat, *dropshipper* bertindak sebagai agen atau wakil, dalam kondisi ini barang masih berada ditempat produsen, dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang (*dropshipper*) ke tangan konsumen.¹⁶³

Solusi-solusi tersebut bisa ditempuh dengan beberapa alternatif, yaitu:

a. Menggunakan sistem akad *Ba'i salam*

Akad *salam* merupakan salah satu jenis bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi *salam* akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam akad *salam*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual (tangan kedua) dimana penjual sebagai tangan pertama (*supplier*). Namun tidak terdapat dalam akad *salam* antara *supplier* dan *dropshipper*. Akad *salam* terdapat antara *dropshipper* dengan *customer* (konsumen), dimana konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, kemudian *dropshipper* memesan barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut kepada *supplier* sesuai dengan kriteria pesanan konsumen.

Implementasi akad *salam* yang telah disesuaikan dengan simulasi transaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut:

1) *Muslim* (pembeli)

Pembeli dalam akad *salam* harus cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang disepakati.

2) *Muslimilah* (penjual)

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual disyaratkan harus cakap hukum dan tidak boleh ingkar janji.

3) Hasil produksi/barang yang diserahkan (*muslim fih*)

Hasil produksi merupakan objek barang yang akan diserahkan oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Hasil produksi tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang (barang najis, haram, samar, tidak jelas) atau barang yang dapat menimbulkan kemudharatan.

¹⁶³ Yahya Hastuti, 9 *Kunci*, h. 45-47.

4) Harga

Harga disepakati diawal akad antara penjual dan pembeli, dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Harga barang harus ditulis jelas dalam kontrak, serta tidak boleh berubah selama masa akad.

Adapun dalam jual beli online sistem *dropshipping*, terdapat rukun akad *salam* pada sistem tersebut, yaitu:

- 1) Orang yang berakad, yaitu *dropshipper* dan *customer*;
- 2) Objek barang, terdapat objek barang yang jelas, yaitu pakaian;
- 3) Shighat (*Ijab* dan *Qabūl*). Kesepakatan yang terjalin baik antara *supplier* dan *dropshipper*, maupun *dropshipper* dan *customer*.

Sementara itu syarat yang disyariatkan dalam menggunakan sistem *dropshipping* pun telah sesuai dengan fiqh yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad

Sesuai ketentuan syarat akad *salam* dimana para pelaku akad harus berakal dan baligh. Disini para pihak sudah memenuhi syarat.

- 2) Syarat yang terkait dengan barang

Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang nyata wujudnya, kondisi sempurna, dan barang dalam keadaan *readystock*.

- 3) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran

Waktu penyerahan barang biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 hari setelah barang dipesan. Dan tempat penyerahan barang bisa ditentukan oleh *customer*. Para pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilai rupiah sebagai alat transaksi dan juga *customer* telah melunasi seluruh pembayaran di awal akad.

b. Menggunakan akad *wakalah*

Berbeda dengan akad *salam* yang orientasinya merupakan akad jual beli untuk mencai profit. Akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat *tabbaru'*, yang orientasinya tidak mencari *profit*, melainkan tolong-

menolong. Namun dalam perkembangannya, akad *wakalah* ini bisa juga tidak hanya sekedar bersifat *tabbaru'*, namun dapat juga mengambil *fee* di dalamnya. Akad ini disebut *wakalahbil ujroh*. Transaksi *wakalah* ini akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Implementasinya dalam transaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia berstatus sebagai pemilik urusan (benda) dan menguasainya, serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal.
- 2) Orang yang mewakili (*wakil*), syarat bagi orang yang mewakili adalah orang yang berbekal. Jika ia idiot, gila, belum dewasa maka batal. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali atas seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain.¹⁶⁴
- 3) Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), syaratnya:
 - a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah diwakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
 - b) Pekerjaan yang dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang dimilikinya sendiri.
 - c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar.

¹⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh*, h. 189.

- 4) *Şigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *şigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.¹⁶⁵

Adapun dalam jual beli online sistem *dropshipping*, sesuai dengan simulasi yang telah dijelaskan. Selain terdapat akad *salam* didalamnya, maka dapat disimpulkan juga bahwa terdapat salah satu akad lain, yaitu akad *wakalah*. Yakni berikut penjelasannya:

- 1) Terdapat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) yaitu *supplier*, dan terdapat orang yang mewakili (*wakil*) yaitu Putra Batik Pekalongan sebagai *dropshipper*.
- 2) Bagi *muwakkil*, ia adalah asli pemilik barang/benda, bukan orang lain. Sehingga jika terjadi cacat pada benda, maka si *muwakkil* dapat bertanggung jawab.

Sementara itu, syarat yang disyariatkan pun dalam menggunakan sistem *dropshipping* telah sesuai dengan fiqh, yaitu:

- 1) Syarat penggantian, sesuai dengan ketentuan syarat untuk sesuatu yang diwakilkan dalam akad *wakalah* dimana boleh untuk mewakilkan sesuatu. Disini Putra Batik Pekalongan sebagai *dropshipper* bertindak sebagai penjual, mewakilkan *supplier* untuk menjualkan barang dagangan miliknya.
- 2) Syarat mewakilkan, Putra Batik Pekalongan mewakilkan *supplier* dalam menjual barang dagangannya ketika ia telah menyatakan berwakil. Disini barang dimiliki oleh Putra Batik Pekalongan untuk diwakilkan, maka *supplier* tidak menjual barang tersebut (saat barang tersebut di *keep* atau pesan oleh Putra Batik Pekalongan) kepada pihak lain karena sudah dimiliki Putra Batik Pekalongan.
- 3) Syarat diketahui dengan jelas. Disini diketahui dengan jelas bahwa barang yang diperjualkan adalah pakaian.
- 4) *Şigat*, kesepakatan yang terjalin dengan baik antara *supplier* dan Putra Batik Pekalongan selaku *dropshipper* merupakan *şigat*.

¹⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 234.

Dalam sistem *dropshipping* terjadi dua kali akad dalam satu transaksi, akad yang pertama yaitu akad antara pembeli dengan *reseller*, dalam hal ini terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak tepenuhi, yaitu *reseller* menjual barang yang belum menjadi miliknya. Namun, apabila telah terjadi kesepakatan antara *supplier* dan *reseller* dimana *supplier* memberikan izin kepada *reseller* untuk menjualkan produknya, maka hal ini diperbolehkan karena *reseller* dianggap kepanjangan tangan dari *supplier* dan *reseller* mewakili *supplier* untuk menjualkan barang miliknya. Mengenai barang yang tidak ada pada *reseller* ketika ia menjual barang tersebut, maka hal ini termasuk dalam kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual beli *salam*.

Kemudian, akad yang kedua yaitu antara *reseller* dengan *supplier*. Tidak ada permasalahan dalam akad yang kedua ini, karena *reseller* terlebih dahulu meminta izin kepada *supplier* untuk menjualkan barang miliknya, maka dalam hal ini *reseller* bertindak mewakili *supplier*, dimana terjadi akad *wakalah* dalam proses jual beli ini, dan hukumnya adalah sah. Kedua belah pihak (*supplier* dan *reseller*) mendapatkan keuntungan atas transaksi ini. Jual beli ini disebut *Ba'i al-fuḍulī*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 Terhadap Akad Jual Beli *Dropship* Pada Putra Batik Pekalongan”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara online pada Putra Batik Pekalongan merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*, *supplier* akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Transaksi *dropshipping* ini dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa pilihan akad yakni dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Ba’i as-salam* dan *wakalah*.
2. Secara hukum Islam, Putra Batik Pekalongan telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual Putra Batik Pekalongan tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya mensosialisasikan jiwa berwirausaha, sistem *dropshipping* ini perlu diperkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda agar bisa terbentuk mental untuk menjadi seorang pebisnis (*entrepreneur*).

2. Untuk para pelaku usaha online diharapkan lebih cermat lagi dalam berkomunikasi dengan pihak *dropshipper*, agar segala kesalahan mengenai barang dapat diminimalkan.
3. Perlu dipertegas lagi tentang aturan menjadi seorang *dropshipper* atau *supplier* untuk meminimalkan tindak penipuan, bisa dengan cara perketatan pada saat registrasi. Pemerintahpun harus membuat aturan yang tegas mengenai tindak penipuan online, dengan membuat pasal-pasal tentang penipuan dalam jual beli online sehingga para pelaku penipuan jual beli online bisa menjadi jera.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hinggamenekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan saya semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, tt.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Jaziri, Abdulrahman. *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Taqwa, 2003.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung, Hasyimi, 2004.
- Al-Kasani, Imam. *al-Bada'i ash-Shana'i*. Juz V. Beirut: Dar Fikr.
- Al-Khin, Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mahzhab Imam Syafi'i*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Terj. Moch. Anwar. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Penerjemah: Fedrian Hasmand. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- al-Qazuwaini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan ibn Majah*. Juz 7. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.t. Hadis ke 2269.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*. Jilid VII. Terj. Darwis, L.C. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- . *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*. Terj. Thariq Abdul Azizi Tamimi. Cet. 2. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya. *Al-Adzkar Al-Majmu*. Juz 9. Mesir: Muniriyah, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 12. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- As-Saibani, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad. *Musnad Ahmad*. Juz 37. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.t. hadis ke- 17728.
- As-Sanhuri, Abdurrazak. *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*. Terj. Samsul Anwar. Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005.
- Asy-Sarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhta*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis*. Edisi Terjemah. Libanon: Darul Fikr, 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- _____. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh wa Adillatuh*. Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.
- Bahri, Fadhli. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'Lu wa Al-Marjan*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011.
- Barlinta, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Emzir, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012.
- Fordebu dan Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hamzah, Andi. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hastuti, A. Yahya. *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW dan Khadijah ra*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Humam, Al-Kamal Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Juz V. Beirut: Dar al-Taqwa, tt.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin YAzid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Daru ihyail kutub al-arabiyaah-Faisal Isa al-halabi. Vol II.

_____. *Sunan ibn Majah*. Juz 7. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al Misriyah, t.th. Hadis ke 2269.

Madani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Maman. *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Mujib, Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Purnamasari, Irma Devita & Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*. Cet.1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.

Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Purnomo, Catur Hadi. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jilid III. Cet. 4. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2010).
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cet. 22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Chatibul. *Fiqh Empat Madzhab*. Jombang: Darul Ulum Press, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Zainal, Veithzal Rivai dkk, *Mengislamkan Marketing Masyarakat dan Memasyarakatkan Marketing Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*. Jakarta: Almahira, 2010.

Jurnal

- Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online". *Jurnal Studi Keislaman*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Indonesia, Vol. 9, No. 2 Maret 2015.

Regulasi

- Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Skripsi

Fatmawati, Desi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship* Online (Studi Kasus Ariana Shop)”. *Skripsi*. Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017, tidak dipublikasikan.

Kalbuadi, Putra. “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, tidak dipublikasikan.

Mardiyana, Yuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping* By Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”. *Skripsi*. Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, tidak dipublikasikan.

Nasihah, Nurul. “Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mahzab)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, tidak dipublikasikan.

Wawancara

Wawancara dengan Ulil Albab, Pemilik Toko Online Putra Batik Pekalongan sekaligus *supplier/dropshiper*, 8 Maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan Nabila Nurul Islami, *reseller* pada Putra Batik Pekalongan, 10 Maret 2020, jam 8.00-9.00 WIB

Wawancara dengan Al Zakky *costumer* pada Putra Batik Pekalongan, 10 Maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB

Lain-Lain

<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diambil pada tanggal 11 Maret 2020.

<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diambil pada tanggal 11 Maret 2020.

https://komunitas.Putra_Batik_Pekalongan.com/news/6955-gs7ctb, diakses pada 11 Maret 2020.

Mauren Anindya, “Pahami Untung Rugi Menjalankan Bisnis *Dropship*”, artikel dikutip dari <http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4> diakses pada 11 Maret 2020.

Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia” dikutip dari www.bpkn.go.id diakses pada 11 Maret 2020, h. 1.

www.bursaMuslim.com diakses tanggal 17 November 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mukhammad Nur Aziza
2. NIM : 1502036152
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Desember 1994
5. Alamat : Dsn. Krajan Rt 04 Rw 03 Kelurahan Panunggalan
Kecamatan Pulokulon
6. Email : Fannyizzanuril@gmail.com
7. No. HP / WA : 083866897506

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Dharma Wanita Panunggalan Grobogan Lulus Tahun 2001
- b. SD Negeri 1 Panunggalan Grobogan Lulus Tahun 2007
- c. MTs Miftahul Huda Panunggalan Grobogan Lulus Tahun 2010
- d. SMA NU Panunggalan Grobogan Lulus Tahun 2013
- e. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. PP. Al Uswah
- b. PP. Madrosatul Qur'an Al-Aziziyah

INTRUMEN COSTUMER

1. Pernahkah anda melakukan pembelian produk Putra Batik Pekalongan melalui online?
2. Produk apa saja yang anda beli dari Putra Batik Pekalongan melalui online?
3. Menurut anda, apa saja kelebihan pembeli produk Putra Batik Pekalongan melalui online?
4. Menurut anda, apa saja kelemahan pembeli produk Putra Batik Pekalongan melalui online?
5. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk?
6. Mengapa anda memilih membeli produk Putra Batik Pekalongan?

INTRUMEN RESELLER

1. Sejak kapan anda bergabung sebagai *reseller* Putra Batik Pekalongan?
2. Mengapa anda memilih bekerjasama online dengan Putra Batik Pekalongan?
3. Bagaimana sistem penjualan online Putra Batik Pekalongan yang anda lakukan?

4. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan dari penjualan produk Putra Batik Pekalongan/
5. Bagaimana anda membangun kepercayaan penjualan Putra Batik Pekalongan dengan pihak konsumen?
6. Hal apa saja yang menjadi hambatan anda sebagai *reseller* Putra Batik Pekalongan?
7. Apa saja kemudahan anda bergabung sebagai *reseller* Putra Batik Pekalongan?

INSTRUMEN SUPLIER/DROPSHIPER

1. Bagaimana sejarah berdirinya Putra Batik Pekalongan?
2. Apa saja produk yang diperjualbelikan oleh Putra Batik Pekalongan?
3. Sejak kapan Putra Batik Pekalongan melakukan penjualan online?
4. Bagaimana sistem penjualan online yang diterapkan oleh Putra Batik Pekalongan?
5. Sejak kapan Putra Batik Pekalongan menerapkan sistem dropshipping dan bagaimana proses penjualan dengan cara dropshipping?
6. Bagaimana kebijakan Putra Batik Pekalongan dalam menyikapi permasalahan dalam penjualan, misalnya ada barang yang rusak atau cacat?

7. Jika barang rusak, apakah dapat dikembalikan?
8. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan menggunakan sistem penjualan *dropshipping*?
9. Sudah berapa *reseller* yang bergabung drngan Putra Batik Pekalongan?
10. Bagaimana perbedaan penjualan sistem *dropshipping* dengan sistem *resseller* di Putra Batik Pekalongan?

Produk- produk yang dijual



